



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 161 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin serta menginformasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud dari huruf a akan disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali kota Banjarmasin;
 - c. bahwa untuk ketertiban dan lancarnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali kota Banjarmasin dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali kota Banjarmasin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali kota Banjarmasin tentang Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali kota Banjarmasin Akhir Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Nomor 6402)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9); dan

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 710/8476/OTDA, Tanggal 23 Desember 2021, Perihal Penyiapan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rekomendasi DPRD;
2. Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 120.04/926?OTDA tanggal 26 januari 2022 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pra-Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2021.
- KEDUA** : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Penanggungjawab, Tim Sekretariat dan Tim Penyusun pada SKPD
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, II, III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. Tim Penanggungjawab
- 1) Penanggungjawab : mengarahkan, Memberikan masukan dan arahan atas kebijakanpelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPj;
 - 2) Ketua : mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPj;
 - 3) Wakil Ketua : mengelola pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPj;
 - 4) Sekretaris : menyiapkan teknis pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPj.

- 5) Evaluator : mengevaluasi Dokumen LPPD dan LKPj.
- 6) Anggota : mendukung teknis penyusunan dan kelengkapan data Dokumen

b. Tim Sekretariat

- 1) menyusun rencana dan jadwal kegiatan tim;
- 2) menyiapkan kegiatan rapat Tim sesuai jadwal yang ditetapkan;
- 3) menyiapkan surat-menyurat dalam rangka koordinasi dengan SKPD dan Instansi terkait untuk kelancaran dan kualitas hasil kegiatan;
- 4) melaksanakan pengumpulan bahan, verifikasi dan pengolahan data;
- 5) mencetak/mengagendakan laporan yang telah disusun dan pertanggungjawaban administrasi kegiatan.

c. Tim Penyusun SKPD

- 1) mengumpulkan dan menyusun data LPPD dan LKPj pada Satuan kerja Perangkat Daerah dan atau Perusahaan Daerah Masing-masing;
- 2) menyampaikan data LPPD dan LKPj pada SKPD pada Satuan kerja Perangkat Daerah dan atau Perusahaan Daerah Masing-masing kepada Tim Sekretariat;
- 3) melakukan perbaikan atau melengkapi data yang sudah dievaluasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 cq. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 161 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGUNGJAWAB
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggungjawab
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris
6.	Inspektur Kota Banjarmasin	Evaluator
7.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 161 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
 BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT
 TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
 WALI KOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2021

NO	N	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2		3
1.	Umar	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Ketua
2.	Ahmad Faisal Anshory, S.STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Wakil Ketua
3.	Agus Wardhana, SE., M.Ec. Dev.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Sekretaris
4.	Ariffian Noor Subhani, S.IP., M.IP.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin	Anggota
5.	M. Lukmannul Hakim, S.AP.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Setdako Banjarmasin	Anggota
6.	Isna Hastarinda Astuty, SH.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota
7.	Satria Yudha Lesmana, S.Kom., M.Eng	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah	Anggota
8.	M. Syofwaturrahman, S.ST.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kepegawaian dan Diklat	Anggota
9.	Hj. Nurin Aulia, SE	Kepala Sub. Bag Perencanaan DPKPAD	Anggota
10.	Salafuddin, S.Sos.	PPUPD Ahli Madya Inspektorat	Anggota
11.	4 (empat) orang	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 161 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	2	3	4
1	Hj. Yurliani, SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Inspektorat
2	Rimelda, SE	Pengadministrasi Umum	
3	Drs. R. Sudrajat	Senior Manager Sekretaris Perusahaan	PDAM Bandarmasin
4	H. Muhammad Noor Yandi, S.ST.	Koordinator Sekretaris dan Dokumen Kontrol	
5	Hj. Mustati Maharani, SE	Kepala Satuan Pengawas Intern	Perumda PALD Banjarmasin
6	Wardhana Yulian Putra, SE	Bendahara Gaji	
7	Maria Ulfah, SE	Kasubbag Penyusunan Program	Badan Kesbangpol
8			
9	Miftah Al Hajir, S.Psi, MA.	Kabid Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN	BKD dan Diklat
10	M. Arifin Abas, A.Ak	Pengelola Program dan Laporan	
11	Satria yudha Lesmana, S.Kom. M.Eng	Kasubbag Perencanaan	Barenlitbangda
12	Elfrida Nurnazmina, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	
13	Budi Fitriadi, SE	Sekretaris	BPBD
14	Loly Hidayat	Petugas TRC	
15	Hj. Nurin Aulia, SE	Kasubbag Perencanaan	Badan PKPAD
16	Hj. Puji Mawarti, SE	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	

No	Nama	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah
17	Ahdalena Desiariani, ME	Kasubbag Perencanaan	Dinas Lingkungan Hidup
18	Aprina, SE	Penyusun Program Anggaran dan Laporan	
19	M. Ramdhan, ST.	Kasubbag Perencanaan	Dinas Budparpora
20	Johar Arif, ST	Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran	
21	Orisa Hartanty, SE		
22	Ani Syahrizah, SH	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	DPKP
23	Nooryadi Rakhman, S.STP	Bendahara Penerimaan	
24	Lariza Hybreda, ST, MM	Kasubbag Perencanaan	Dinas PU PR
25	Anisah, A.Md	Jft. Prakom Pelaksana Lanj.	
26	Maulida Fatmawati, SH	Kasubbag Perencanaan	
27	Muhammad Khairani, SE	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Kominfo
28	Winita Yuniarsih, SE	Kasubbag Perencanaan	Dinas Pendidikan
29	Arief Rahman Gazali, A.Md	Jft. Prakom Pelaksana Lanj.	
30	Nur Madiyah, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Kopumaker
31	Nurwati, SE	Analisis Perencanaan Program dan Kegiatan	
32	Muslihah, SE	Kasubbag Perencanaan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
33	Abdul Hadi, S.Pi	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Dinas KP3
34	Faisal Harris, SE	Analisis Perencanaan	
35	Syaiful Anwar, S.Ap, MA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas PMPTSP
36	Novita Tristiyanti, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	
37	Noorliana, SKM, ME	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Dinas Kesehatan
38	Akhiriana Saputri	Staf	
39	Indiharto Kurniawan, SPi	Kasubbag Perencanaan	Dinas Sosial
40	Wanda Razid, S.Kom	Staf	
41	Hj.Halimatussa'diah,S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Perhubungan
42	Hervita Sari, S.Pd	Staf Perencanaan	
43	Sri Linda Wati, SE	Kasubbag Perencanaan	Dinas Perdagangan
44	Erliyani, A.Md	Jft. Prakom Pelaksana Lanj.	

No	Nama	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah
45	Taufiq. S.KM.	Kasubbag Perencanaan	Dinas DP3A
46	Nor Aspiana, S.Sos	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	
47	Yahdiyanoor	Kasubbag Perencanaan	Dinas PPKBPM
48	Sintia Rustamiansari	Staf	
49	Diah Kumalasari, S.Si	Kasubbag Perencanaan	Dinas Duk Capil
50	Denny Yudhistira Nugroho, A.Md	Jft. Prakom Pelaksana Lanj.	
51	Hj. Meliyani, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Perpu. dan Arsip
52	Ayu Auliani	Staf	
53	Umar	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Pemerintahan
54	Wijayanti, SE	Analisis Desa dan Kelurahan	
55	H. Irwani Samad, SE. M.AP	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
56	Adi Pradana, SE	Penyusun Bahan Bimtek	
57	Hunaini, S.AP	Kasubbag Keuangan	Bagian Umum
58	Muhtaram, SE. MM	Penyusun Kebutuhan barang dan Inventarisasi	
59	Ariffian Noor Subhani, S.IP, M.IP	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Organisasi
60	Rifa'atul Hidayah, S.AP	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	
61	Isna Hastarinda Astuty, SH	Analisis Hukum Ahli muda	Bagian Hukum
62	Ahmad Afrian H. A.Md	Pengelola Data dan Informasin Hukum	
63	Almali, ST	Kasubbag Protokol	Bagian Prokompi
64	Yoyok Budi Santoso	Staf	
65	M. Ferry Syaifudin, SE. MA	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Perekonomian SDA
66	M. Fradive Putra	Pramu Administrasi	
67	H. Ridianur Zairi, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Administrasi Pembangunan
68	Rahmiati, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
69	Munawarah, S.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Kesramas
70	Zulkifli, S.Kom	Analisis Kesejahteraan Rakyat	
71	Noor Atika Rizki, S.Sos	Kasubbag Pembukuan dan Akuntansi	Sekretariat DPRD
72	Dinda Meityawan, A.Md. Ak	Pengelola Akuntansi	
73	Fitria Ilmiah, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sat Pol PP
74	Ratih Purnama, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

No	Nama	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah
75	Ida Rakhmawati, SH.	Kasi Pemerintahan	Kec. Banjarmasin Timur
76	Ardaniah	Pengadministrasi Kepegawaian	
77	Dewi Citra Sari, SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kec. Banjarmasin Selatan
78	Imam Kurniadi, SE	Penyusun Program dan Pelaporan	
79	Muhammad Liqa Syuhada, S.STP	Kasi Pemerintahan	Kec. Banjarmasin Barat
80	Risna Amalia Fitri, A.Md	Pengelola Pemamfaatn BMD	
81	Yusniah, A.Md	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kec. Banjarmasin Utara
82	Muhammad Rizalul Fikrie, S.ST	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	
83	Rima Handayani, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Banjarmasin Tengah
84	Agus Hariyadi, SE	Staf	
85	Tito Raditya Arya Wicaksono	Pranata Komputer Muda	BPS
86	Banna Izzatul Hasanah, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA